

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri perbankan merupakan salah satu sektor strategis dalam sistem perekonomian suatu negara. Menurut (Ceysa et al., 2024) peran utamanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja keuangan tidak hanya menjadi indikator kesehatan internal perusahaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengukuran dan peningkatan kinerja keuangan menjadi hal yang penting. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), hingga efisiensi operasional seperti BOPO dan *Net Interest Margin* (NIM) (Asy'arie et al., 2022)

Dalam praktiknya, kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh banyak faktor internal, menurut (Sitepu & Utami, 2023) salah satunya adalah penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Umumnya *Good Corporate Governance* diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang tidak hanya bagi kepentingan sepihak, namun bagi semua kepentingan dengan menggunakan sistem pengelolaan perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat sebagai pengambil keputusan yang menekankan pada keputusan perusahaan. Salah satu pedoman umum *Good Corporate Governance* yakni dapat menerapkan tujuan *Good Corporate Governance*, dimana perusahaan dapat memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan masyarakat sekitar. Tata kelola yang baik diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko operasional,

dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan (Susanti & Handayani, 2022).

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor perbankan yang ada di Indonesia, seperti kasus hilangnya tabungan Rp 1,6 miliar milik Vira Vazria pada PT BRI cabang Sisingmaraja. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen. Selanjutnya penetapan Yusak El Halcon, Direktur Utama Bank Jambi, sebagai tersangka kasus korupsi dalam skandal gagal bayar PT Sunprima Nusantara menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat manajerial tertinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas Dewan Direksi dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

Sisi positif dari penerapan *Good Corporate Governance* di perbankan ialah KYE (*Knowing Employee*) yang diterapkan oleh Bank Danamon terhadap karyawan baru, sebelum karyawan tersebut bergabung dengan Bank Danamon. Dari fenomena yang ada, bank diwajibkan memperhatikan dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang didukung oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance*. Program ini menjadi bentuk nyata dari komitmen institusi terhadap pengawasan dan pemantauan integritas karyawan sejak awal perekrutan, yang menunjukkan bahwa pelibatan pemilik saham institusional melalui kebijakan strategis dapat mendorong bank untuk menjaga reputasi dan kinerja keuangan jangka panjang. Di sisi ini, Kepemilikan Institusional yang kuat diduga berperan dalam mendorong implementasi GCG secara lebih ketat. OJK juga telah menerbitkan roadmap untuk perbankan di Indonesia sampai tahun 2025, yang akan memandu kebijakan dan kesepakatan di masa depan. OJK akan mendorong perbankan untuk lebih memperkuat tata kelola dalam teknologi informasi (TI) dan manajemen risiko (Prakoso *et al.*, 2023).

Selain itu, Kepemilikan Manajerial dalam perusahaan perbankan juga berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan, terutama dalam hal insentif untuk menjaga efisiensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham, mereka cenderung memiliki kepentingan langsung terhadap hasil keuangan, sehingga berupaya menghindari praktik yang dapat merugikan perusahaan, seperti fraud atau manipulasi laporan keuangan.

Merespons tantangan dan dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia hingga tahun 2025 yang menekankan pada pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pemanfaatan teknologi informasi. OJK dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga terus mendorong implementasi Pedoman Good Corporate Governance (GCG) sebagai dasar penguatan peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta peningkatan transparansi melalui Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial, guna menciptakan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip GCG dalam Konteks Penelitian

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini menekankan pada keterbukaan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh para stakeholder. Dalam konteks ini, Dewan Direksi berperan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan, strategi bisnis, dan risiko perusahaan disampaikan secara transparan. Kurangnya transparansi sering kali menjadi penyebab penurunan kepercayaan investor dan kinerja keuangan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menuntut agar struktur organisasi perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Dewan Komisaris memiliki fungsi utama dalam mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh direksi. Lemahnya akuntabilitas sering menyebabkan penyimpangan manajemen yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja keuangan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip ini mengharuskan perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan finansial, sehingga tercipta kinerja keuangan yang berkelanjutan.

d. *Independensi (Independency)*

Independensi berarti bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan. Struktur kepemilikan manajerial yang proporsional dapat membantu menciptakan independensi manajemen, karena manajer juga menjadi pemilik yang terlibat langsung dalam hasil kerja mereka, sehingga keputusan bisnis lebih objektif dan terfokus pada peningkatan kinerja perusahaan.

e. *Kewajaran (Fairness)*

Kewajaran mengacu pada perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk hak-hak investor minoritas. Dalam hal ini, keberadaan kepemilikan institusional dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk memastikan bahwa manajemen tidak hanya mementingkan pihak internal, melainkan juga memperhatikan kepentingan stakeholder secara adil.

Salah satu pilar utama dari *Good Corporate Governance* adalah keberadaan struktur pengelolaan perusahaan, yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

- a. Dewan Komisaris adalah salah satu elemen penting dalam struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi, serta memastikan bahwa kebijakan dan strategi perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas eksternal yang independen dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan yang objektif terhadap manajemen, termasuk memantau risiko yang dihadapi perusahaan (Achmad Nur Kholis, 2023).

b. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki peran sentral dalam mengelola operasional harian perusahaan dan membuat keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbeda dengan Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi, Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kegagalan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menurut prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi harus menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Anwar & Hidayat, 2021).

Efektivitas kerja dari kedua organ ini menjadi penentu penting dalam menjaga stabilitas dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh (Febrina & Sri, 2022) menekankan bahwa menjaga kinerja keuangan merupakan suatu keharusan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan meningkatnya minat calon investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan. Selain struktur pengelolaan, aspek kepemilikan saham juga turut memengaruhi pengambilan keputusan dan pengawasan dalam perusahaan.

c. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan. Lembaga ini memiliki peran sebagai pengawas (monitoring) atas manajemen perusahaan, karena mereka memiliki kepentingan besar terhadap nilai perusahaan (Sitanggang, 2021). Dengan adanya pengawasan ketat dari investor institusional, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan aset, dan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Menurut (Affan et al., 2023) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE).

Dalam sektor perbankan, banyak bank besar di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang didominasi oleh lembaga-lembaga keuangan atau investor institusional, seperti dana pensiun, asuransi, atau pemerintah melalui BUMN. Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dimiliki

mayoritas oleh pemerintah Indonesia. Kepemilikan oleh institusi besar ini biasanya memberikan tekanan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen agar bekerja lebih profesional dan transparan. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memantau kinerja manajemen serta menuntut akuntabilitas. Oleh karena itu, tingginya kepemilikan institusional diyakini dapat mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

- d. Kepemilikan Manajerial adalah kondisi di mana pihak manajemen (direksi, komisaris, manajer) perusahaan juga memiliki saham di perusahaan tersebut (Febrina & Sri, 2022). Tujuan utamanya adalah menyamakan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, sehingga manajemen lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. (Hendrayati et al., 2025) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, menekankan pentingnya peran manajemen dalam kepemilikan saham untuk meningkatkan kinerja.

Kepemilikan manajerial mencerminkan kondisi ketika pihak manajemen (seperti direktur atau manajer) juga memiliki saham di perusahaan. Di beberapa bank, proporsi saham yang dimiliki oleh manajer atau direksi cenderung kecil. Namun, ketika manajemen memiliki saham, mereka akan terdorong untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan perusahaan juga akan berdampak pada keuntungan pribadi mereka sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik keagenan, karena kepentingan manajemen selaras dengan pemilik saham. Ini pada akhirnya diyakini dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Namun demikian, pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap kinerja keuangan perbankan belum menunjukkan konsistensi dalam berbagai penelitian terdahulu. Beberapa studi menunjukkan hubungan positif yang signifikan, sementara yang lain menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan

sama sekali. Menurut penelitian (Affan *et al.*, 2023) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan menurut (Yulianti & Cahyonowati, 2023) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut (Affan *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE), sedangkan menurut (Yulianti & Cahyonowati, 2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Demikian pula Kepemilikan Manajerial (Hendrayati *et al.*, 2025) dan (Wahyudi *et al.*, 2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, menekankan pentingnya peran manajemen dalam kepemilikan saham untuk meningkatkan kinerja. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh (Febrina & Sri, 2022) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Inkonsistensi ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memunculkan pertanyaan: sejauh mana struktur *Good Corporate Governance* benar-benar mampu memengaruhi kinerja keuangan, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki karakteristik regulasi dan risiko yang berbeda dari sektor lain. Hal ini membuka ruang diskusi ilmiah mengenai efektivitas struktur tata kelola dan kepemilikan dalam konteks sektor perbankan, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik pasar dan regulasi yang dinamis.

Fenomena aktual yang terjadi pada industri perbankan Indonesia dalam kurun waktu 2021–2024 turut memperkuat urgensi dari penelitian ini. Salah satu contohnya terdapat pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa adanya penurunan ROA dan NIM pada trend kinerja keuangan yang terjadi pada kurun waktu 2021-2024.

Penurunan ROA dapat menjadi indikasi bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum berjalan secara optimal. Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam memantau kebijakan manajemen dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ketika ROA menurun secara drastis, hal ini dapat dikaitkan dengan lemahnya pengawasan terhadap risiko strategis dan operasional, yang seharusnya menjadi fokus pengawasan komisaris.

Sebagai pihak yang menjalankan operasional harian perusahaan, Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam mengambil keputusan bisnis yang berdampak langsung pada profitabilitas. Penurunan ROA menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak cukup adaptif terhadap tekanan eksternal seperti perubahan suku bunga dan likuiditas. Ini mencerminkan adanya kemungkinan ketidakefisienan dalam strategi bisnis atau lemahnya manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.

Kepemilikan oleh institusi keuangan besar biasanya dikaitkan dengan peningkatan pengawasan terhadap manajemen karena institusi memiliki insentif untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan. Jika ROA mengalami penurunan meskipun terdapat kepemilikan institusional yang signifikan, maka perlu dipertanyakan seberapa aktif peran institusi tersebut dalam mendorong perbaikan kinerja. Penurunan ROA dalam konteks ini bisa mencerminkan bahwa peran pemegang saham institusi belum cukup kuat dalam menekan manajemen untuk bertindak lebih efisien dan bertanggung jawab.

Secara teori, ketika manajemen memiliki saham di perusahaan, mereka akan terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan karena kinerja yang buruk juga akan berdampak pada kekayaan pribadi mereka. Namun, jika ROA menurun di perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, ini menimbulkan pertanyaan: apakah kepemilikan tersebut cukup besar untuk mempengaruhi perilaku manajemen? Atau justru manajemen kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan pasar? Fenomena ini membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana kepemilikan manajerial berperan dalam menjaga kinerja keuangan.

Dengan demikian, penurunan ROA bukan hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya ketidakefektifan dalam struktur tata kelola, termasuk peran dewan komisaris, direksi, dan komposisi kepemilikan saham.

Sejumlah bank, khususnya Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti kategori I (KBMI I), mengalami penurunan laba bersih secara drastis. Sebagai contoh, Bank MNC Internasional mencatat penurunan laba sebesar 31,98% pada

kuartal I/2024, sementara Bank Ina Perdana mencatat penurunan hingga 44,22%. Bahkan, bank besar seperti Bank Mandiri menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan koreksi harga saham terbesar sejak 2011. Faktor-faktor seperti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), berakhirnya masa relaksasi kredit, serta perlambatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan margin bunga bersih (NIM) turut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan perbankan secara umum.



Gambar 1. 1 Grafik Tren Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia tahun 2021–2024

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK)

Melihat pentingnya topik ini dan adanya celah riset sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris “**Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024**”.

1.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan.
3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan.
4. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan.
5. Menganalisis Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan melalui optimalisasi peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta pengelolaan struktur kepemilikan, sehingga dapat merancang strategi penguatan Good Corporate Governance dan meningkatkan profitabilitas serta daya saing.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya investor dan calon investor, mengenai pentingnya

struktur tata kelola dan kepemilikan dalam memengaruhi kinerja keuangan perbankan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan Good Corporate Governance. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, serta menyusun karya ilmiah secara sistematis dan akademis.



